



RENCANA KERJA 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Disperka Tahun 2021-2026. Renja Tahun 2023 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Lalu, Tujuan dan capaian Renstra OPD, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Renja sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disperka Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerjanya.

Mojokerto, September 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO



NOERHONO, S Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721008 199201 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	10
Tabel 2.2.....	20
Tabel 2.3.....	22
Tabel 2.4.....	30
Tabel 3.1.....	33
Tabel 3.2	35
Tabel 4.1.....	42

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 merupakan dokumen resmi daerah yang diperuntukkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rancangan Rencana Kerja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing OPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program / kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Selain itu, Renja PD ini mempunyai fungsi penting yang mendasar dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat pengguna.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto terintegrasikan dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2022, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mojokerto.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.
3. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4) ;
 31. Peraturan Dae
 32. rah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Darah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 33. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto.
 34. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Nomor 188/048/416-117/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang

berkenaan dengan pelayanan bidang Perpustakaan, Bidang Kearsipan dan Bidang Pengembangan.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Perpustakaan dan kearsipan, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja PD, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja Propinsi/Kabupaten/Kota serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD. Subbab ini berisi uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindakluti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini berikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan Jumlah Sub

Kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi program, Kegiatan dan Sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, sub Kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2024.

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 75,94 % sebagai berikut:

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 5.660.106.497
Penambahan APBD	<u>Rp. 81.123.600</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 5.578.982.897
Realisasi	<u>Rp. 4.236.914.624</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 1.342.068.273</u>

Sedangkan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2022 adalah sebesar **Rp. 4.729.450.400,- (Empat Milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
(Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021**

NAMA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg sd Tahun (N-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja PD n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD sd Tahun Berjalan (2022)	
					Target Renja PD Tahun (N-2)	Realisasi Renja PD Th (n-2)	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Prog dan Keg sd Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			80,62	80,91	100,35%			
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target			94	171,61	182,56%			
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	100%			
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	100%			
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			83,40%	75,94%	71,22%			
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	12 bulan	100%			

2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan yang disusun			7 laporan	7 laporan	100%			
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan			90%					
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Waktu Penyediaan ATK			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan			86%					
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja			1 Orang	1 Orang	100%			
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.08.09	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja			4 Orang	4 Orang	100%			

2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi baik			90%					
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Waktu Penyediaan BBM, Servis, Ganti Suku Cadang Kendaraan			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung / Kantor			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			11	12,138	110,35%			
		2. Indeks Kegemaran Membaca			40	63,94	159,85%			
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah Buku yang dibeli 2. Jumlah Peserta, 3. Jumlah bahan pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka			1.1000 Eks 2. 100 Orang 3.20 Eks	1.623 Eks 2. 111 Orang 3.18 Eks				
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Buku yang Dibeli			1000 E-book	-	0			
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan yang Disusun			1 laporan	1 Laporan	100%			
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Bahan Pustaka Lokal dan Perbaikan Bahan Pustaka			20 Eksemplar	18 Eksemplar	90%			

2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti			100 Orang	111 Orang	111%			
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang Dibeli			1000 Eksemplar	623 Eksemplar	62,3%			
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca			15 Kali	15 kali	100%			
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokasi, Jumlah Peserta			50 Lokasi & 75 Orang	60 Lokasi & 390 Orangkasi	120% & 520%			
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Desa Penerima Bantuan			2 Desa	2 paket Buku utk DEsa	-			
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Lomba			125 Orang	193 Orang	154,4%			
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Peserta Kegiatan			240 Orang	240 Orang	100%			
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta Lomba Duta Baca			50 Orang	41 Orang	82%			
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja			50%	133,7%	267,4%			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola Arsip Dinamis sesuai aturan			5 OPD	5 OPD	100%			
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Lembaga yang Dimonitoring	25		25 OPD	56 OPD	224%			
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah OPD	5		5 OPD	6 OPD	120%			
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan Arsip			5 OPD	1 OPD	20%			

		Statis ke Lembaga Kearsipan Daerah								
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Berkas yang Dipelihara			250 berkas	177 berkas	70,8%			
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				50%	167%	334%			
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan			3 peraturan	5 peraturan	166,6%			
2.24.03.2.01.03	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan			3 peraturan	5 peraturan	166,6%			

Pada Tahun 2021 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tahun anggaran 2021, didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 5.578.982.897,-** yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel. Jumlah anggaran dan Realisasi Tahun 2021, terbagi ke dalam rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	BELANJA OPERASI	5.314.516.714	4.043.432.924	76,08
	a. Belanja pegawai	4.287.642.097	3.142.064.722	73,28
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.026.874.617	901.368.202	87,77
2.	BELANJA MODAL	264.466.183	193.481.700	73,16
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.798.980	47.770.000	66,53
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.073.803	83.441.700	92,63
	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.593.400	62.270.000	60,69
	Total	5.578.982.897	4.236.914.624	75,94

Jumlah Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi pada Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.838.982.897	3.584.477.020	74,07
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.723.700	97,23
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.452.700	99,37

b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.271.000	90,84
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.249.632.097	3.108.644.672	73,15
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.241.132.097	3.101.329.722	73,13
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.500.000	7.314.950	86,06
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.826.000	122.094.300	76,39
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	40.500.000	62,31
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.969.000	99,88
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.157.800	95,44
d.	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	34.077.500	97,36
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.326.000	15.390.000	56,32
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.524.800	151.432.648	72,27
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.764.480	4.346.486	91,23
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.262.400	104.260.218	65,06
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.497.920	42.825.944	96,24
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	192.581.700	91,71
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	46.288.000	90,76
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.000.000	124.738.700	88,11
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.000.000	21.555.000	93,72
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	602.500.000	517.933.767	85,96
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.000.000	170.552.894	72,58
a.	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	55.000.000	14.890.000	27,07
b.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.808.200	99,62
c.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.900.758	59,60
d.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar nasional Perpustakaan	60.000.000	47.604.350	79,34
e.	Pengembangan bahan Pustaka	45.000.000	43.349.586	96,33

2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	367.500.000	345.778.010	94,08
a.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	122.500.000	122.399.006	99,92
b.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	44.661.000	99,25
c.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100.000.000	90.671.247	90,67
d.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	50.000.000	44.199.107	88,39
e.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	43.847.650	87,70
III.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	107.500.000	106.731.000	99,28
1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	79.951.000	99,93
a.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	30.000.000	29.962.500	99,88
b.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50.000.000	49.988.500	99,98
2.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	27.500.000	26.780.000	97,38
a.	Akuisisi, Pengeolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	27.500.000	26.780.000	97,38
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	30.000.000	29.375.700	97,92
1.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi D bawah 10 (sepuluh) Tahun	30.000.000	29.375.700	97,92
a.	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	30.000.000	29.375.700	97,92
Total		5.578.982.897	4.236.914.624	75,94

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Juncto Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Disperka Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis DISPERKA Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Urusan Kearsipan
 - a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
 - b. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Urusan Perpustakaan
 - a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
 - b. Indeks Kegemaran Membaca

Kinerja pelayanan yang dicapai Disperka Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperka Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.2
 (Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK (PP-06/08)	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						CATATAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	I. Indikator Kinerja Kunci (PP-06/08)															
	Urusan Kearsipan															
1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban			50%	50%	52%	54%	56%	58%							
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahanpertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara			50%	53%	53%	56%	59%	62%							
	Urusan Perpustakaan															
3.	Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat			n/a	11	12	13	14	15							
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			40,5	41	41,5	41,5	42	42							

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto di masa yang akan datang. Isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat terlepas dari permasalahan dan isu yang berkembang secara dinamis dalam pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahan dan isu yang berkembang dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan urusan Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya adalah:

1. Urusan Perpustakaan
 - a. Indeks Kegemaran Membaca
 - b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
2. Urusan Kearsipan
 - a. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban
 - b. Tingkat Keberadaan dan keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	4.279.478.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	4.279.478.400	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	94 %	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	94 %	15.000.000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	7 dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	7 Laporan	7.500.000	

Rencana Kerja 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto

	Daerah		Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
5	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.853.016.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	3.853.016.000	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.853.016.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan	3.853.016.000	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	122.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90 %	122.500.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	25.000.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	7.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	7.500.000	
11	Penyediaan	Kab.	Jumlah paket	1 paket		Penyediaan	Kab.	Jumlah paket	1 paket		

	Bahan / Material	Mojokerto	bahan material yang disediakan		25.000.000	Bahan / Material	Mojokerto	bahan material yang disediakan		25.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyeleng Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	15.000.000	
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	200.262.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	90 %	200.262.400	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	140.262.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	140.262.400	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	60.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	60.000.000	
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	88.700.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90%	88.700.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas	10 unit	45.700.000	Penyediaan Jasa	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan Dinas	10 unit	45.700.000	

	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			
18	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	25.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	25.000.000	
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	18.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	18.000.000	
20	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokerto	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12	105.000.000	Program Pembinaan Perpustakaan	Kab. Mojokerto	2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12	105.000.000	
			3. Indeks Kegemaran Membaca	41				4. Indeks Kegemaran Membaca	41		
21	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	1. Jumlah Buku yang dibeli 2. Jumlah bahan pustaka	1. 1000 Eksemplar 2. 20	75.000.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /	Kab. Mojokerto	3. Jumlah Buku yang dibeli 4. Jumlah bahan pustaka	3. 1000 Eksemplar 4. 20	75.000.000	

			local dan perbaikan bahan pustaka	Eksemplar		Kota		local dan perbaikan bahan pustaka	Eksemplar		
22	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layananan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Service Manajemen)	1 layanan	15.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Mojokerto	Jumlah layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan manajemen Layananan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Service Manajemen)	1 layanan	15.000.000	
23	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 eksemplar	25.000.000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 eksemplar	25.000.000	

24	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten / Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan	10.000.000	
25	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Mojokerto	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	1.000 eksemplar	35.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Mojokerto	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	1.000 eksemplar	35.000.000	
26	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	30.000.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	30.000.000	
27	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	25 Locus	15.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah locus Pembudayaan Kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	25 Locus	15.000.000	

28	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	15.000.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Mojokerto	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi social di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	15.000.000	
29	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas Kinerja	52%	45.000.000	Program Pengelolaan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas Kinerja	52%	45.000.000	
30	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	30.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	30.000.000	
31	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	500 berkas	20.000.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kab. Mojokerto	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	500 berkas	20.000.000	
32	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil	500 berkas	10.000.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan hasil Pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	500 berkas	10.000.000	
33	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga	5 OPD	15.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten / Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga	5 OPD	15.000.000	

			Kearsipan Daerah					Kearsipan Daerah			
34	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	500 berkas	15.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	500 berkas	15.000.000	
35	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungawaban	53%	15.000.000	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kab. Mojokerto	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungawaban	53%	15.000.000	
36	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	15.000.000	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	3 peraturan	15.000.000	
37	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	500 berkas	15.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Kab. Mojokerto	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang	500 berkas	15.000.000	

			memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun			(sepuluh) Tahun		memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun			
TOTAL					4.444.478.400	TOTAL					4.444.478.400

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas:

1. Penguatan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing, dengan indikator Pemenuhan layanan dasar pendidikan yang berkualitas
2. Penyederhanaan Birokrasi, dengan indikator Peningkatan Budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat sejak usia dini yang menguasai IPTEK dan talenta-talenta global.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan.

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2023
Kabupaten Mojokerto

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPERKA) Kabupaten Mojokerto mendasarkan pada pencapaian prioritas nasional, Renstra Perpustakaan Nasional, Renstra Arsip Nasional, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur, RPJMD/RPJPD, Renstra Disperka Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan di sektor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto mendasarkan pada kebijakan nasional terangkum dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disperka Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Bidang Perpustakaan

- a. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. Pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- c. Pengembangan perpustakaan menjadi pusat belajar, berkegiatan, berketerampilan, berkreasi dan berekreasi;
- d. Pembinaan semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan;
- e. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka sinergi kegiatan yang mendukung untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- f. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan termasuk pelestarian koleksi lokal Kabupaten Mojokerto;

2. Kebijakan Bidang Kearsipan

- a. Membangun sistem kearsipan yang komprehensif pada semua instansi guna menciptakan akuntabilitas tata kelola kearsipan;
- b. Menyusun pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi tata kelola kearsipan;

- c. Pengembangan sistem kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuju sistem kearsipan digital;
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan tata kelola kearsipan;
- e. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna dari semua instansi;
- f. Meningkatkan pelayanan, sosialisasi dan pembinaan kearsipan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan**

Tujuan dan Sasaran Renja PD disusun berdasarkan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketaqwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur di semua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya dan pelestarian lingkungan

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah **misi ketiga.**

Selanjutnya pada tabel dibawah ini digambarkan secara jelas tujuan dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	
				2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public		Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	84%	85%
2.		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	62
3.		Meningkatnya Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan	79%	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka disusunlah program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
3. Nilai IKM Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto yang akan dilaksanakan Tahun 2023 telah disusun dan dibahas dalam forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto yaitu 4 Program dan 10 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan jumlah dana Rp. **4.444.478.400 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus rupiah)** dari APBD Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

II. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - b. Pengembangan kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - d. Pengembangan Bahan Pustaka
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - b. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

III. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut :

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten/Kota
1. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

IV. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan yang mendukung dari penetapan program ini adalah sebagai berikut:

1. Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, yang terdiri dari Sub Kegiatan :
 - a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
(TABEL TC-33 dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN TAHUN 2023						Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD	APBD Prov	APBN			
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Disperka	82,72	4.279.478.400	V	-	-		4.403.844.097	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Disperka	94%	15.000.000	V	-	-		15.000.000	
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disperka	2 Dokumen	7.500.000	V	-	-		7.500.000	
		Rincian :										
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran perangkat Daerah				7.500.000						
	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperka	7 laporan	7.500.000	V	-	-		7.500.000	
		Rincian :										
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan, LKjIP, LKPI, LPPD				7.500.000						
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Disperka	90%	3.853.016.000	V	-	-		4.393.844.097	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disperka	30 Orang/bulan	3.853.016.000	V	-	-		4.393.844.097	
		Rincian :										
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.853.016.000						
	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan paket Bahan material yang disediakan	Disperka	100 laporan	15.000.000	V	-	-		39.000.000	
		Rincian :										
		Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi				15.000.000					39.000.000	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Disperka	86%	200.262.400	V	-	-		308.322.365	
	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Disperka	12 laporan	140.262.400	V	-	-		163.322.365	
		Rincian :										

		Pembayaran rekening listrik, telepon, Wifi				140.262.400						163.322.365
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Disperka	12 laporan	60.000.000	V	-	-		12 laporan	145.000.000
		Rincian :										
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)				60.000.000						145.000.000
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Disperka	90%	88.700.000	V	-	-		90%	390.000.000
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Disperka	10 unit	45.700.000	V	-	-		10 unit	50.000.000
		Rincian :										
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				45.700.000						50.000.000
	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	3 unit	25.000.000	V	-	-		3 unit	300.000.000
		Rincian :										
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya				25.000.000						300.000.000
	2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Disperka	1 unit	18.000.000	V	-	-		1 unit	40.000.000
		Rincian :										
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya				18.000.000						40.000.000
2	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Disperka	12	105.000.000	V	-	-		13	472.500.000
			2. Indeks Kegemaran Membaca		41						41,5	
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah buku yang dibeli 2. Jumlah bahan pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka	Disperka	1. 1000 Eksemplar 2. 20 Eksemplar	75.000.000	V	-	-		1. 1000 Eksemplar 2. 20 Eksemplar	282.500.000
	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Service Manajemen)	Disperka	1 Layanan	15.000.000	V	-	-		1 layanan	157.500.000
		Rincian :										
		Pengadaan e-book				15.000.000						157.500.000
	2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Disperka	20 Eksemplar	15.000.000	V	-	-		20 Eksemplar	25.000.000

		Rincian :										
		Pelestarian bahan pustaka Lokal dan perbaikan bahan pustaka				15.000.000						25.000.000
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	Disperka	Perpustakaan	10.000.000	V	-	-		Perpustakaan	50.000.000
		Rincian :										
		Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan				10.000.000						50.000.000
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	Disperka	1000 Eksemplar	35.000.000	V	-	-		1000 Eksemplar	50.000.000
		Rincian :										
		1. Pengadaan Koleksi Perpustakaan (Perpustakaan Daerah)				15.000.000						
		2. Pengadaan Koleksi untuk Desa (TMMD)				5.000.000						
		3. Pengadaan Koleksi untuk RTH (5 lokasi)/ Mendukung KLA				15.000.000						
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	Disperka	15 kali	30.000.000	V	-	-		15 kali	190.000.000
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan	Disperka	25 Locus	15.000.000	V	-	-		75 Locus	125.000.000
		Rincian :										
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA				15.000.000						125.000.000
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Disperka	Perpustakaan	15.000.000	V	-	-		Perpustakaan	65.000.000
		Rincian :										
		Penguatan kapasitas Pengelola Perpustakaan Sekolah berbasis inklusi social				15.000.000						65.000.000
3	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	Disperka	52%	45.000.000	V	-	-		54%	107.500.000
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	Disperka	5 OPD	30.000.000	V	-	-		5 OPD	80.000.000
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan	Disperka	500 berkas	20.000.000	V	-	-		1000 berkas	50.000.000
		Rincian :										
		Biaya penyusutan arsip In aktif										

						20.000.000						50.000.000
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Disperka	1 laporan	10.000.000	V	-	-		1 laporan	30.000.000
		Rincian :										
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)				10.000.000						30.000.000
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	Disperka	5 OPD	15.000.000	V	-	-		5 OPD	27.500.000
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Disperka	500 berkas	15.000.000	V	-	-		1000 berkas	27.500.000
		Rincian :										
		Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis				15.000.000						27.500.000
4	2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Disperka	53%	15.000.000	V	-	-		56%	30.000.000
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	Disperka	3 peraturan	15.000.000	V	-	-		3 peraturan	30.000.000
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	Disperka	500 berkas	15.000.000	V	-	-		750 berkas	30.000.000
		Rincian :										
		1. Pelaksanaan penilaian arsip				10.000.000						20.000.000
		2. Rakor Penyusunan Produk Hukum tentang Pemusnahan Arsip				5.000.000						10.000.000
JUMLAH TOTAL						4.444.478.400						5.013.844.097

BAB IV

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dengan rencana program kegiatan serta pendanaan sebagai berikut :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB	APBD PROV		USULAN APBN			KET
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK	
1	2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,72	Disperka	4.279.478.400	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	94%	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Disperka	7.500.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :													
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran perangkat Daerah							7.500.000						
	2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	Disperka	7.500.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :													
		Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan, LKjIP, LKPI, LPPD							7.500.000						
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	Disperka	3.853.016.000	-	-	-	-	-	
	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Disperka	3.853.016.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.853.016.000						
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	90%	Disperka	122.500.000	-	-	-	-	-	

2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Disperka	50.000.000	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000						
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Disperka	25.000.000	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Penyediaan makanan dan minuman						25.000.000						
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	Disperka	7.500.000	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Biaya Foto copy dan penggandaan						7.500.000						
2.23.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Material			Jumlah paket Bahan material yang disediakan	1 paket	Disperka	25.000.000	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Penyediaan alat tulis kantor						25.000.000						
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan Penyelenggaraan paket Bahan material yang disediakan	100 laporan	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Perjalanan Dinas ASN/Rapat Konsultasi dan Koordinasi						15.000.000						
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		Disperka	200.262.400	-	-	-	-	-	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Disperka	140.262.400	-	-	-	-	-	
	Rincian :												
	Pembayaran rekening listrik,												

		telepon, Wifi						140.262.400						
	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	Disperka	60.000.000	-	-	-	-	-
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (THL)							60.000.000					
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		90%	Disperka	88.700.000	-	-	-	-	-
	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan			Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		10 unit	Disperka	45.700.000	-	-	-	-	-
		Rincian :												
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya							45.700.000					
	2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		3 unit	Disperka	25.000.000	-	-	-	-	-
		Rincian :												
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya							25.000.000					
	2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			Jumlah Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	Disperka	18.000.000	-	-	-	-	-
		Rincian :												
		Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan lainnya							18.000.000					
2	2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan			1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		12	Disperka	105.000.000	-	-	-	-	-
				2. Indeks Kegemaran Membaca		41	30.000.000							
	2.23.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1. Jumlah buku yang dibeli 2. Jumlah bahan pustaka lokal dan perbaikan bahan pustaka		1. 1000 Eksemplar 2. 20 Eksemplar	Disperka	75.000.000	-	-	-	-	-

2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah layanan perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000(ITSM : Information Technology Service Manajemen)	1 Layanan	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	-
	Rincian :											
	Pengadaan e-book					15.000.000						
2.23.02.2.01.03	Pengembangan kekhasan koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	20 Eksemplar	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	-
	Rincian :											
	Pelestarian bahan pustaka Lokal dan perbaikan bahan pustaka					15.000.000						
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan Standart Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	Disperka	10.000.000	-	-	-	-	-	-
	Rincian :											
	Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan					10.000.000						
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	1000 Eksemplar	Disperka	35.000.000	-	-	-	-	-	-
	Rincian :											
	1. Pengadaan Koleksi Perpustakaan (Perpustakaan Daerah)					15.000.000						
	2. Pengadaan Koleksi untuk Desa (TMMD)					5.000.000						
	3. Pengadaan Koleksi untuk RTH (5 lokasi)/ Mendukung KLA					15.000.000						

	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	15 kali	Disperka	30.000.000	-	-	-	-	-	
	2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada satuan pendidikan	25 Locus	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :												
		Biaya Operasional Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)/Mendukung KLA						15.000.000						
	2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Jumlah Perpustakaan Berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :												
		Penguatan kapasitas Pengelola Perpustakaan Sekolah berbasis inklusi social						15.000.000						
3	2.24.02	Program Pengelolaan Arsip			Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	52%	Disperka	45.000.000	-	-	-	-	-	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah mengelola arsip dinamis sesuai aturan	5 OPD	Disperka	30.000.000	-	-	-	-	-	
	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan penyusutan	500 berkas	Disperka	20.000.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :												
		Biaya penyusutan arsip In aktif						20.000.000						
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah laporan hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	Disperka	10.000.000	-	-	-	-	-	
		Rincian :												
		Monitoring dan evaluasi tata kelola kearsipan (56 OPD)						10.000.000						
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah PD yang sudah menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah	5 OPD	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	

	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Preservasi dan Akses Arsip Statis			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 berkas	Disperka	15.000.000							
		Rincian :													
		Biaya Pemeliharaan, Perawatan dan Penggunaan Arsip Statis						15.000.000							
4	2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip													
					Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	53%	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan	3 peraturan	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	2.24.03.2.01.01	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun			Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 berkas	Disperka	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
		Rincian :													
		1. Pelaksanaan penilaian arsip						///							
		2. Rakor Penyusunan Produk Hukum tentang Pemusnahan Arsip						5.000.000							
JUMLAH TOTAL								4.444.478.400							

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah, perencanaan ini diawali dengan rapat antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Hasil Musrenbang disusun untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang didalamnya juga termasuk perencanaan penganggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sasaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Mojokerto, September 2022
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO


NOERHONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721008 199201 1 001